

Pengaruh *Governance* terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Saring Suhendro¹, Azolla Degita Azis^{2*}, Gandy Wahyu Maulana Zulma³

¹Universitas Lampung

²Universitas Ibn Khaldun Bogor

³Universitas Jambi

*Correspondence email: azolladegita@gmail.com

Abstract. *This paper examines that good government governance has directly and moderating effect on local income tax determination. Using data from 33 province government in Indonesia for year 2008 and 2012, this research shows that good government governance is significant factor that improve local tax income directly and moderate variable. Good government governance strengthens positive correlation of per capita income and local tax income. While good government governance has not proven negative weakness of inflation and local tax.*

Keywords: *governance; local tax*

Pendahuluan

Pajak daerah memegang peranan yang sangat penting bagi suatu daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Mengingat pentingnya peran dan fungsi pajak tersebut maka penerimaan pajak menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Pada era otonomi, daerah diharapkan mandiri dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya kapasitas fiskal sebagai pencerminan kemandirian daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya sendiri dan tidak bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat. Namun, tingkat kemandirian daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata sebesar 10,25% tahun 2011; 9,89% tahun 2012; dan 11,36% tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat menggantungkan pembiayaan pembangunan kepada pemerintah pusat. Selain itu juga, pemerintah daerah masih menghadapi tingkat pengumpulan pajak daerah yang rendah karena ketidakefisienan dalam sistem pengumpulan pajak daerah (Lutfunnahar, 2007).

Beberapa studi yang menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan penerimaan pajak pada level penerimaan pajak negara di negara berkembang diantaranya Tanzi dan Zee (2000), dan Imam dan Jacobs (2007). Tanzi & Zee (2000) menjelaskan bahwa penerimaan pajak negara dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, kontribusi ekspor mineral terhadap GDP, ekonomi terbuka, dan rasio uang terhadap GDP. Sedangkan Iman dan Jacobs (2007) menyatakan bahwa faktor-faktor penentu penting penerimaan pajak pemerintah adalah pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, keterbukaan, inflasi, dan korupsi.

Penelitian sejenis di Indonesia dilakukan Kusmono et al., (2011) yang menunjukkan bahwa variabel PDB, inflasi, suku bunga SBI dan delta WP mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah pusat Indonesia. Sedangkan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Indonesia menggunakan variabel struktural yaitu PDRB perkapita riil, jumlah penduduk, inflasi, besaran APBD, dan jumlah industri Triani dan Kuntari (2009), Veronika (2003). Selain itu, PDRB per kapita riil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak (Bahl, 1971). Penelitian tersebut hanya menginvestigasi faktor-faktor struktural dan ekonomi.

Penelitian terdahulu di Indonesia hanya menginvestigasi faktor-faktor yang menentukan penerimaan pajak ditinjau dari variabel struktural dan ekonomi saja yaitu pendapatan per kapita, inflasi, jumlah penduduk, jumlah industri, keterbukaan, dan korupsi. Belum ada penelitian yang menggunakan faktor institusional yaitu tata kelola pemerintahan untuk penelitian jenis pajak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah tata kelola pemerintahan berpengaruh secara langsung maupun memoderasi determinan penerimaan pajak daerah. Tata kelola pemerintahan diprosikan dengan indeks tata pemerintahan (G_Index) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Indeks tata kelola pemerintahan merupakan gambaran penilaian menyeluruh dari enam prinsip tata kelola yang baik (partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas) di empat arena stakeholder provinsi (pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi).

Menurut peneliti, faktor-faktor struktural dimoderasi oleh tingkat kualitas tata kelola pemerintahan pemerintah daerah menentukan besaran penerimaan pajak daerah. Selain itu, dalam konteks penelitian terdahulu di Indonesia dilakukan dengan metode studi kasus yang menggunakan sampel satu pemerintah kabupaten/kota saja dengan data time series (Triani dan Kuntari, 2009; Terra, 2003; Winarti, 2003; dan Darumalsyah, 2012). Penelitian yang lebih luas

menggunakan sampel satu provinsi saja (Winarti, 2003). Penelitian yang menggunakan data seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian ini akan melihat faktor determinasi penerimaan pajak daerah di seluruh pemerintah provinsi seluruh Indonesia periode tahun 2008 dan 2012 dengan tata kelola pemerintahan sebagai variabel moderasi. Tata kelola pemerintahan diproksikan sebagai indeks tata kelola pemerintahan atau Indonesian Governance Index (IGI) yang penelitiannya dilakukan oleh the partnership for Indonesia reform (kemitraan). Kemitraan merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan Australian AID. Dengan menggunakan data 33 pemerintah provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2008 dan 2012, penelitian menunjukkan hasil bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Ketika variabel tata kelola pemerintahan diuji sebagai variabel moderasi, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan mampu memperkuat hubungan antara pendapatan perkapita dengan penerimaan pajak daerah. Ketika pendapatan perkapita tinggi dan kualitas tata kelola pemerintahan tinggi, maka tingkat penerimaan pajak daerah akan lebih meningkat. Namun untuk variabel inflasi, indeks tata kelola pemerintahan tidak mempengaruhi hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah tentang kualitas tata kelola pemerintahan yang menjadi masalah bagi penerimaan pajak daerah. Hal ini menjadi pertimbangan pada efektifitas administrasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola (partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas) sebagai bagian dari peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat yaitu bermanfaat untuk melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengumpulkan penerimaan pajak daerah.

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan Tata Kelola Pemerintahan dan Penerimaan Pajak Daerah

Phillip dan Sandall (2008) menginvestigasi hubungan antara tata kelola pemerintahan dan penerimaan pajak. Studi ini menjelaskan bahwa ada tiga elemen kunci yang mencerminkan hubungan antara tata kelola pemerintahan, perpajakan, dan iklim investasi. Kualitas tata kelola mempengaruhi sistem perpajakan dan legitimasi pemerintah yang baik, keinginan wajib pajak untuk membayar pajak, dan efektivitas administrasi pajak yang merupakan pilar utama pada sistem perpajakan yang baik (Phillip dan Sandall, 2008). Tata kelola pemerintahan yang baik dapat mempengaruhi sistem pertumbuhan ekonomi yang baik. Di negara berkembang, pada umumnya tidak mampu mengumpulkan jumlah potensial penerimaan melalui perpajakan karena masalah tata kelola pemerintahan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor-faktor institusional menentukan kinerja pendapatan (Bird *et al*, 2004). Bird *et al*. (2004) menunjukkan bahwa faktor penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penentu yang penting pada penerimaan pajak. Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan hal yang penting untuk perencanaan dan pengumpulan pajak daerah. Pada saat penghindaran pajak daerah dan korupsi pejabat publik secara umum negatif, maka berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak serta pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Tata kelola pemerintahan merupakan faktor utama yang menentukan penerimaan pajak. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik mendorong sistem pajak yang memadai, meningkatkan administrasi pajak, kebijakan ekonomi yang lebih baik, dan pada akhirnya menghasilkan penerimaan pajak yang lebih banyak. Pengumpulan pajak daerah tergantung kepada administrasi perpajakan yang dikelola secara baik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dengan demikian tata kelola pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak). Dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem pajak yang baik pula yang mendorong masyarakat membayar pajak untuk layanan publik yang lebih baik. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1 : Kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah

Hubungan Pendapatan Perkapita dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Literatur teoritis menjelaskan bahwa penerimaan pajak tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita digunakan sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi. Pendapatan perkapita merupakan indikator yang baik untuk menunjukkan perkembangan menyeluruh dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendapatan perkapita diukur rasio dari PDRB harga kostan dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode satu tahun. Selain itu, pendapatan perkapita juga merupakan satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Nilai pendapatan perkapita tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi yang akan menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan barang dan jasa akan meningkat lebih cepat). Ada hubungan positif dan kuat antara pendapatan perkapita dengan penerimaan pajak (Chelliah, 1971). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan pajak yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan pajak daerah kemampuan masyarakat untuk membayar pajak untuk meningkat (Chelliah, 1971 dan Tanzi & Zee, 2000; Iman dan Jacobs, 2007; Triani dan Kuntari, 2009). Berdasarkan hubungan antara pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah, peneliti menduga tata kelola pemerintahan mempengaruhi hubungan tersebut. Jika pendapatan perkapita yang tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka keinginan (*willingness to pay*) dan kemampuan (*ability to pay*) masyarakat untuk membayar pajak daerah semakin tinggi. Penerimaan pajak daerah akan meningkat apabila tingkat pendapatan perkapitanya tinggi dan kualitas tata kelola pemerintahan juga tinggi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2 : Kualitas tata kelola pemerintahan memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah

Hubungan Inflasi dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Perubahan lingkungan kebijakan makro ekonomi berkontribusi penting dalam penerimaan pajak. Inflasi merupakan proksi yang baik untuk mengukur lingkungan kebijakan ekonomi untuk menangkap pengaruh kebijakan makro ekonomi tersebut. Peningkatan penerimaan pajak sangat responsif terhadap perubahan terhadap inflasi. Inflasi berdampak negatif terhadap penerimaan pajak (Patoli et al., 2012). Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu/dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Misalnya kenaikan harga menjelang hari raya atau yang terjadi sekali saja dan tidak berdampak terhadap kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain tidak disebut sebagai inflasi. Teori kuantitas dijelaskan bahwa sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*), sehingga jumlah uang yang beredar dimasyarakat banyak. Kelebihan permintaan (*demand*) tersebut disebabkan oleh jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat jumlahnya sangat sedikit dan terjadi kelangkaan barang. Inflasi mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan peningkatan biaya produksi perusahaan. Peningkatan biaya produksi akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perusahaan berkurang. Oleh karena berkurangnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka penerimaan pajak yang dipungut pemerintah terhadap perusahaan tersebut menjadi semakin menurun. Oleh karena itu, laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak daerah akan menurun. Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah penerimaan pajak (Iman dan Jacobs (2007); Patoli et al., 2012; Kusmono et al (2011) dan Triani dan Kuntari (2009). Untuk mengurangi dampak negatif dari pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dapat dimoderasi oleh tingkat tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga semakin tinggi kualitas tata kelola pemerintahan maka akan memperlemah pengaruh negatif tingkat inflasi terhadap keinginan (*willingness to pay*) dan kemampuan (*ability to pay*) masyarakat untuk membayar pajak daerah.

H3 : Kualitas tata kelola pemerintahan memperlemah hubungan inflasi dan penerimaan pajak daerah

Metode

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh entitas Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2008 dan 2012. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) entitas Pemerintah Provinsi di Indonesia. Penggunaan 2 (dua) tahun penelitian dikarenakan data indeks tata kelola pemerintahan untuk pemerintah provinsi dilakukan baru 2 kali yaitu tahun 2008 dan 2012 dan hanya untuk entitas Pemerintah Provinsi di Indonesia. Sumber data penelitian untuk data penerimaan pajak daerah diambil dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2008 dan 2012. Data pendapatan perkapita dan jumlah penduduk diperoleh dari Biro Pusat Statistik, sedangkan data inflasi diperoleh dari website Bank Indonesia. Berdasarkan pada analisis terkait model empiris dari Ajaz dan Ahmad (2010), peneliti mengestimasi model linear berikut menggunakan regresi OLS:

$$\text{Tax}_{it} = A_0 + A_1 \text{pendkap}_{it} + A_2 \text{inflasi}_{it} + A_3 \text{g_Index}_{it} + A_4 \text{populasi}_{it} + \epsilon_{it}$$

Untuk menguji peran moderasi tata kelola pemerintahan terhadap hubungan pendapatan perkapita dan inflasi dan penerimaan pajak daerah (H2 dan H3) menggunakan persamaan interaksi sebagaimana disajikan pada persamaan (2) berikut ini:

$$\text{Tax}_{it} = B_0 + B_1 \text{pendkap}_{it} + B_2 \text{inflasi}_{it} + B_3 \text{pendkap}_{it} * \text{G_Index}_{it} + B_4 \text{inflasi}_{it} * \text{G_Index}_{it} + B_5 \text{g_Index}_{it} + B_6 \text{populasi}_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana: *tax*: adalah penerimaan pajak daerah, yang diukur dengan logaritma natural dari total pajak pemerintah provinsi *i* tahun *t*; *g_index_{it}*: adalah indeks tata kelola pemerintahan pemerintah provinsi *i* pada tahun *t* yang diukur dengan variabel dummy 1 untuk nilai indeks diatas median dan 0 untuk dibawah nilai median; *pendkap_{it}*: adalah pendapatan perkapita pemerintah provinsi *i* pada tahun *t*; *inflasi_{it}*: adalah tingkat inflasi pemerintah provinsi *i* pada tahun *t*; *pendkap_{it}*g_index_{it}*: interaksi antara pendapatan perkapita dan *g_index* pemerintah provinsi *i* pada tahun *t*; *inflasi_{it}*g_index_{it}*: interaksi antara inflasi dan *g_index* pemerintah provinsi *i* pada tahun *t*; *populasi_{it}*: adalah jumlah penduduk pemerintah daerah *i* pada tahun *t*; α dan β : koefisien regresi; dan ϵ_{it} : *error*

Hasil

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2008 dan 2012. Data diambil dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI, Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan *Partnership Kemitraan*. Tabel 1 melaporkan ringkasan statistik deskriptif mean, median, maximum, minimum, dan standar deviasi dari keseluruhan sampel. Variabel dependen Tax menunjukkan nilai mean dan median adalah sama yaitu 27,25 dan variasi yang rendah dimana standar deviasinya 1,36. Pendapatan perkapita menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tersebut memiliki besaran yang tidak bervariasi dengan standar deviasi sebesar 0,75. Sedangkan nilai rata-rata dari *D_Igi* sebesar 0,53 dibawah nilai median yaitu sebesar 5,5. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi masih berada dalam kategori cukup. Jumlah penduduk antar pemerintah provinsi menunjukkan jumlah yang tidak bervariasi ditunjukkan dengan standar deviasi rendah yaitu sebesar 1,05.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
Tax	27.25	27.25	30.51	24.72	1.36
Pendkap	16.72	16.65	18.59	15.21	0.75
Inflasi	9.62	8.73	20.03	5.71	3.00
D_Igi	0.53	1.00	1.00	0.00	0.50
Populasi	15.15	15.09	17.58	13.15	1.05

Sumber: data olahan

Tax adalah total penerimaan pajak daerah yang diukur menggunakan logaritma natural dari total penerimaan pajak daerah. Pendkap adalah pendapatan perkapita yang diukur menggunakan logaritma natural dari pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan. Inflasi adalah nilai inflasi rata-rata tahunan. *D_Igi* adalah indeks tata kelola pemerintahan yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk nilai indeks diatas median (5,5) dan 0 untuk nilai dibawah median. Populasi adalah jumlah penduduk yang diukur dengan logaritma natural dari total jumlah penduduk. Tabel 2 melaporkan matriks korelasi pearson (ρ) antara Tax, Pendkap, Inflasi, *D_Igi*, Dan Populasi. Korelasi yang cukup kuat antara *D_Igi* dan Tax positif dan signifikan ($\rho = 0,491$, $p\text{-value} = 0,000$) mengindikasikan bahwa Indeks tata kelola pemerintahan merupakan faktor penentu penerimaan pajak daerah. Korelasi antara Pendkap dan Tax secara positif mengindikasikan bahwa pendapatan perkapita merupakan faktor penentu penerimaan pajak daerah. Sedangkan korelasi antara Inflasi dan Tax menunjukkan hubungan negatif yang mengindikasikan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tax. populasi berhubungan negatif dengan tax.

Tabel 2.
Pearson Correlation

	Tax	Pendkap	Inflasi	D_Igi	Populasi
Tax	1,000				
Pendkap	0,547 (0,000)	1,000			
Inflasi	- 0,281 (0,023)	- 0,220 (0,078)	1,000		
D_Igi	0,491 (0,000)	0,253 (0,040)	- 0,394 (0,001)	1,000	
Populasi	0,722 (0,000)	0,113 (0,368)	- 0,167 (0,179)	0,324 (0,008)	1,000

Sumber: data olahan

Pengujian hipotesis pertama (H1) dilakukan untuk menguji faktor determinasi terhadap penerimaan pajak daerah menggunakan persamaan (1). Pengujian ini dilakukan dengan dua tahap uji regresi yaitu (1) regresi tanpa memasukkan variabel kontrol dan (2) regresi dengan memasukkan variabel kontrol. Sedangkan untuk pengujian variabel tata kelola pemerintahan merupakan variabel moderasi dalam hubungan pendapatan perkapita dan tingkat inflasi dengan penerimaan pajak daerah menggunakan persamaan (2), dilakukan dengan melakukan interaksi indeks tata kelola dengan kedua variabel tersebut (model 3). Hasil pengujian empiris kedua tahap uji regresi tersebut disajikan pada Tabel 3.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Tabel 3 untuk model regresi 1, menunjukkan bahwa $D_Igi(\beta_3)$ berhubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Tax) yaitu sebesar 0,978 dengan $p\text{-value} = 0,002$. Hasil positif dan signifikan pada level 1 persen mengindikasikan bahwa semakin baik tata kelola pemerintahan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Setelah memasukkan variabel kontrol (model regresi 2), hasil pengujian juga menghasilkan hasil yang sama dimana koefisien $D_IGI(\beta_3)$ yang positif signifikan yaitu koefisiennya sebesar 0,389 dengan $p\text{-value}=0,005$. Pada model regresi (3) koefisien D_Igi juga menunjukkan hasil sama dengan model regresi (1) dan (2), namun positif dan signifikan pada level 5 persen. Hasil regresi lain pada tabel 3 menyajikan hubungan antara Pendkap dan Tax. Pada ketiga model regresi tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan pada level 1 persen antara pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tanzi dan Zee, 2000; Chelliah, 1971; dan Amin *et al.*, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan perkapita penduduk juga merupakan faktor penting yang menentukan penerimaan pajak daerah.

Tabel 3
Hasil Regresi OLS

Variabel	Expected Sign	(1)	(2)	(3)
Intersep	?	13,361 *** (0,000)	(0,149) (0,925)	3,563 (0,085)
Pendkap	+	0,810 *** (0,000)	0,775 *** (0,000)	0,540 *** (0,000)
Inflasi	-	- 0,018 (0,703)	- 0,004 (0,872)	0,002 (0,948)
D_Igi	+	0,978 *** (0,002)	0,389 *** (0,005)	6,561 ** (0,027)
Pendkap*D_Igi	?			0,421 ** (0,019)
Inflasi*D_Igi	?			- 0,007 (0,867)
Populasi	+		0,943 *** (0,000)	0,949 *** (0,000)
Adjusted R ²		0,405	0,897	0,908
F-Statistik		15,772	142,863	107,402

Sumber: data olahan

Tax adalah total penerimaan pajak daerah yang diukur dengan logaritma natural dari total penerimaan pajak daerah. Pendkap adalah pendapatan perkapita yang diukur dengan logaritma natural dari pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan. Inflasi adalah nilai inflasi rata-rata tahunan. D_Igi adalah indeks tata kelola pemerintahan yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, 1 untuk nilai indeks diatas median (5,5) dan 0 untuk nilai dibawah median. Populasi adalah jumlah penduduk yang diukur dengan logaritma natural dari total jumlah penduduk.

Nilai $p\text{-value}$ ditunjukkan dalam tanda kurung.

*** signifikan pada level 0,01; **signifikan pada level 0,05; dan *signifikan pada level 0,1.

Sedangkan variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan Iman dan Jacobs (2007); dan Amin *et al.* (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak mempengaruhi potensi masyarakat untuk membayar pajak daerah karena mekanisme penetapan pajak provinsi didasarkan pada *official assessment* (ketetapan gubernur) bukan berdasarkan *self assessment*. Mekanisme pungutan *official assessment* didasarkan pada pengenaan pajak yang langsung dikenakan pada saat penggunaan sumber daya seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok (UU No.28 Tahun 2009).

Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan cara menginteraksikan variabel D_Igi dan variabel pendapatan perkapita dengan memasukkan variabel kontrol. Model regresi (3) pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien interaksi $Pendkap*D_IGI(\beta_4)$ adalah positif dan signifikan sebesar 0,421 dengan ($p\text{-value}=0,019$). Hasil positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa apabila semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dan pendapatan perkapita semakin tinggi maka semakin tinggi penerimaan pajak daerah. Jika pendapatan perkapita yang tinggi dengan tata kelola pemerintahan yang baik maka keinginan (*willingness to pay*) dan

kemampuan (*ability to pay*) masyarakat untuk membayar pajak daerah semakin tinggi. Penerimaan pajak daerah akan meningkat apabila tingkat pendapatan perkapitanya tinggi dan kualitas tata kelola pemerintahan baik. Jika dilihat pada model (3) Tabel 3, nilai koefisien variabel Pendkap sebesar 0,540 dan koefisien variabel interaksi Pendkap**D_Igi* sebesar 0,421, maka kedua koefisien tersebut dijumlahkan menjadi 0,961. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terbukti memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memperlemah hubungan negatif inflasi dan penerimaan pajak daerah. Model regresi (3) pada Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi negatif sesuai dengan ekspektasi yaitu sebesar -0,002 namun tidak signifikan dengan nilai *p-value*=0,948. Hasil regresi ini juga konsisten dengan model regresi (1) dan (2) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi bukan merupakan faktor penentu penerimaan pajak pemerintah provinsi. Hasil koefisien interaksi antara Inflasi**D_Igi* juga menunjukkan bahwa nilai koefisiennya negatif namun tidak signifikan yaitu -0,007 dengan *p-value*=0,867. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan tidak terbukti memperlemah dampak negatif dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.

Pengujian hipotesis 1 (H_1) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Iqbal (2014) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah yang dapat meningkatkan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak (*willingness to pay*). Hasil ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah secara positif tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, sistem perpajakan daerah secara positif tergantung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan meningkatkan struktur tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan pajak daerah dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak daerah (Chelliah, 1971, dan Tanzi & Zee, 2000; Iman dan Jacobs, 2007; dan Triani dan Kuntari, 2009).

Pengujian hipotesis 2 (H_2) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan memperkuat hubungan pendapatan perkapita dan penerimaan pajak daerah. Implikasi dari temuan ini bagi pemerintah daerah adalah agar memperhatikan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Upaya yang dapat dilakukan adalah setiap area tata kelola baik di pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi dapat bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sedangkan birokrasi adalah lembaga yang mengimplementasikan kebijakan tersebut merupakan faktor yang paling krusial. Berdasarkan temuan IGI-kemitraan (2012) menyatakan bahwa kepala daerah memiliki pengaruh sangat besar terhadap kinerja tata kelola. Komitmen yang kuat dari gubernur terhadap tata kelola akan berdampak pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan kualitas layanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pengujian hipotesis 3 (H_3) menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan tidak terbukti memperlemah dampak negatif dari tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan pengujian H_1 dan H_2 dimana tingkat inflasi bukan merupakan faktor penentu penerimaan pajak pemerintah provinsi.

Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran tata kelola pemerintahan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data panel untuk 33 entitas pemerintah provinsi di Indonesia periode 2 tahun yaitu 2008 dan 2012. Analisis ini menggunakan indeks tata kelola pemerintahan (*D_IGI*) yang dilakukan oleh lembaga kemitraan. Hasil regresi untuk pengaruh langsung menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel struktural yaitu pendapatan perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Pada hasil uji tata kelola pemerintahan menunjukkan sebagai variabel moderasi yang terbukti memperkuat hubungan pendapatan perkapita dengan penerimaan pajak daerah. Namun, tata kelola pemerintahan tidak terbukti memperlemah hubungan inflasi dengan penerimaan pajak daerah. Keterbatasan penelitian ini adalah pada pemilihan sampel yang digunakan yaitu pada pemerintah provinsi. Penelitian yang menggunakan sampel pemerintah provinsi karena ketersediaan data indeks tata kelola pemerintahan hanya tersedia pada tingkat provinsi saja dan hanya untuk periode tahun 2008 dan 2012 yang menunjukkan keterbatasan data penelitian. Pada saat penelitian dilakukan, indeks tata kelola pemerintahan untuk entitas pemerintah kabupaten dan kota belum tersedia. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan *robustness test* untuk menguji hasil uji empiris dengan membandingkannya dengan uji lain.

Daftar Pustaka

- Amin, Azka., Abdul Majeed Nadeem., Sadia Parveen., Muhammad Asif Kamran., dan Sofia Anwar. (2014). Factors Affecting Tax Collection in Pakistan: An Empirical Investigation. *Journal of Finance and Economics*. Vol. 2, No. 5, 149-155.
- Bahl, R.W. (1971). A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis. *IMF Staff Papers*, 18 (3), 570-612.
- Bird, Richard M., Jorge Martinez-Vanquez, dan B. Torgler. (2008). Tax Effort in Developing Countries and High Income Countries: The Impact of Corruption, Voice and Accountability. *Economic Analysis & Policy*. Vol. 38, No. 1.
- Chelliah, R.J. (1971). *Trends in Taxation in Developing Countries*. International Monetary Fund. 18. 254-331.
- Imam, P.A. dan D.A. Jacobs. (2007). *Effects Corruption on Tax Revenue in the Middle East*. IMF Institute and Fiscal Affairs Departement. IMF Working Paper No. 07/270.
- Iqbal, Muhammad Hossain. (2014). *The Quality of Governance and Tax Effort: Evidence from Developed and Developing Countries*. Final Report on University of Tokyo.
- Kusmono, Heru., Sirojuzilam., dan H.B. Tarmizi, SU. (2011). Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Tesis*. Tidak dipublikasi
- Lutfunnahar, B. (2007). *A Panel Study on Tax Effort and Tax Buoyancy with Special Reference to Bangladesh*. Working Paper 715. Policy Analysis Unit (PAU) Research Departement Bangladesh Bank.
- Patoli, A.Q., Zarif, T., dan Syed, N. (2012). Impact of Inflation on Taxes in Pakistan: an Empirical Study of 2000-2010 period. *Journal of Management and Social Sciences*. 8. (2). 31-41.
- Phillips, M. dan R. Sandall. (2008). Linking Business Tax Reform with Governance: How to Measure Success. A Working Paper Produced in Conjunction with FIAS of the World Bank Group.
- Tanzi, V. dan H. Zee. (2000). Tax Policy for Emerging Markets: Developing Countries. Washington, DC. *International Monetary Fund*. (IMF Working Paper WP/00/35).
- Terra, Joweria M. (2003). Could Do Better: An Appraisal of Uganda's Tax Performance Relative to Sub Saharan Africa. University of Bath. (*Working Paper*).
- Triani dan Yeni Kuntari. (2009). Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar. *Tesis*. Tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Winarti, Veronika Agustiningtyas. (2003). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2001. *Tesis*. Tidak Dipublikasi.